

Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara

Azhar Suganda¹ Putri Nabila Harahap^{1,2} Novi Ramadhini³ Khairul Adli Batubara⁴
Nasrullah Hidayat⁵

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: azharsuganda66@gmail.com¹ putrinabilahrp310@gmail.com²
noviramadhini64@gmail.com³ adlibatubaraa@gmail.com⁴ nasrullah@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Pengangguran merupakan masalah yang umumnya dihadapi dalam suatu perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional termasuk di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh upah minimum kota (UMK) dan indeks pembangunan manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan analisis metode data panel dengan model yang terpilih adalah model *Fixed Effect Model* (FEM) dengan menggunakan aplikasi Eviews versi 10. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum kota (UMK) dan indeks pembangunan manusia berpengaruh sebesar 70,9% terhadap Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Utara sedangkan sisanya sebesar 29,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Tingkat upah minimum kota (UMK) dan indeks pembangunan manusia secara signifikan dan parsial berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Pengangguran, Upah Minimum Kota, Indeks Pembangunan Manusia

Abstract

Unemployment is a problem that is generally faced in an economy, both at the national and regional levels, including in North Sumatra. This study aims to see the effect of the city minimum wage (UMK) and human development index on the Unemployment Rate in North Sumatra Province. The data in this study was sourced from the Central Statistics Agency (BPS) of North Sumatra. This research uses panel data method analysis with the selected model is the Fixed Effect Model (FEM) model using the Eviews application version 10. The results in this study show that the city minimum wage (UMK) and human development index have an effect of 70.9% on the Unemployment Rate of North Sumatra Province, while the remaining 29.8% is influenced by other factors not mentioned in this study. The city minimum wage (UMK) level and human development index significantly and partially affect the unemployment rate in North Sumatra Province.

Keywords: Unemployment, City Minimum Wage, Human Development Index



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

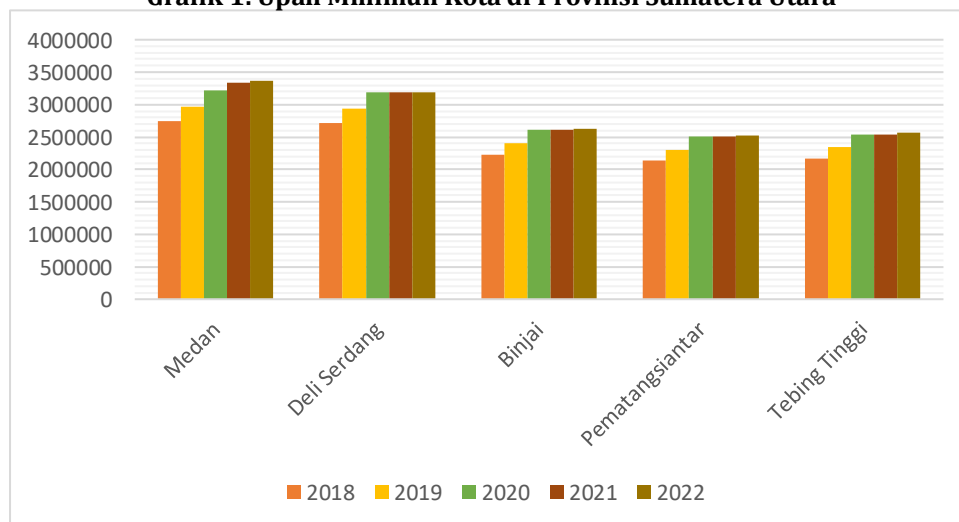
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan maritim yang kaya akan keberagaman yang menjadi sorotan dunia karena keragaman etnis, budaya, dan agamanya yang menghimpun kekayaan luar biasa. Keberagaman ini bukan hanya sekadar ciri khas, tetapi menjadi pondasi kuat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, realitas keberagaman juga menggambarkan kesenjangan pembangunan antarwilayah, dimana beberapa daerah telah mengalami kemajuan signifikan sementara yang lain masih terbelakang. Sebagai negara dengan populasi jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia menghadapi lonjakan permintaan pada sektor barang dan jasa. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk yang besar dapat membawa dampak negatif, seperti rendahnya produktivitas di sektor manufaktur yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran di dalam negeri.

Menurut Todaro (2000), salah satu dampak utama dan faktor penyebab rendahnya standar hidup di negara-negara berkembang adalah keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Dibandingkan dengan negara-negara maju, negara-negara berkembang cenderung menggunakan sumber daya dengan efisiensi yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, adanya underemployment atau pengangguran terselubung, di mana orang-orang bekerja di bawah kapasitas optimal mereka. Kedua, tingginya tingkat pengangguran terbuka, di mana individu yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran merupakan masalah yang umumnya dihadapi dalam suatu perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional. Secara esensial, pengangguran mengacu pada ketidakmampuan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Penting untuk dicatat bahwa pengangguran tidak selalu berarti bahwa individu tersebut benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau sedang aktif mencari pekerjaan. Bahkan, orang yang telah bekerja juga dapat masuk ke dalam kategori pengangguran, karena konsepnya dapat dilihat dari tiga aspek utama: waktu, produktivitas, dan intensitas pekerjaan.

Masalah upah yang rendah menjadi salah satu tantangan utama dalam sektor ketenagakerjaan di Indonesia, yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat pengangguran yang tinggi. Fenomena ini terjadi karena pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan lapangan kerja yang tersedia. Meskipun bukan satu-satunya penyebab, upah minimum berperan penting dalam memengaruhi kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi. Upah tidak hanya sekadar kompensasi bagi pekerja, tetapi juga merupakan faktor penting dalam menentukan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Penetapan tingkat upah oleh pemerintah berdampak langsung terhadap jumlah pekerja di negara tersebut. Semakin tinggi nilai upah yang ditetapkan, semakin besar kemungkinan terjadinya penurunan jumlah pekerja. Dalam konteks pasar bebas, teori penetapan upah mengikuti prinsip bahwa upah setara dengan harga tenaga kerja. Bagi produsen, upah merupakan biaya produksi yang harus ditekan serendah mungkin. Sementara itu, bagi pekerja, upah tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga mencerminkan harga diri dan status sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, upah yang tinggi atau rendahnya memiliki dampak yang luas terhadap individu, keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan. Permasalahan upah yang rendah memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pekerja di Indonesia.

Grafik 1. Upah Minimum Kota di Provinsi Sumatera Utara

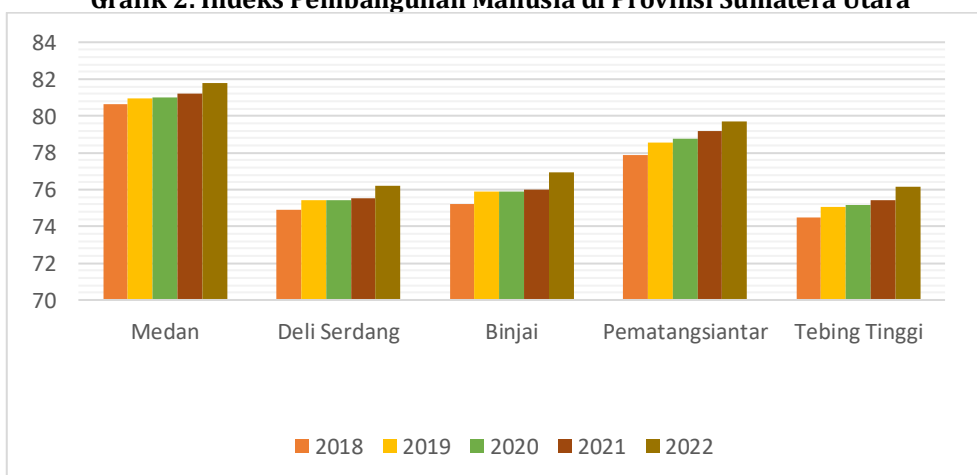


Berdasarkan grafik 1 Upah Minimum Kota di Provinsi Sumatera Utara, pada kota Medan upah minimum kota tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 3.370.645 sedangkan upah minimum kota terendah pada tahun 2018 sebesar 2.749.074. Pada kota Deli Serdang upah minimum kota tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 3.188.592 sedangkan upah minimum kota terendah pada tahun 2018 sebesar 2.720.100. Pada kota Binjai upah minimum kota tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 2.630.684 sedangkan upah minimum kota terendah pada tahun 2018 sebesar 2.230.597. Pada kota Pematangsiantar upah minimum kota tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 2.523.361 sedangkan upah minimum kota terendah pada tahun 2018 sebesar 2.133.977. Pada kota Tebing Tinggi upah minimum kota tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 2.565.424 sedangkan upah minimum kota terendah pada tahun 2018 sebesar 2.164.992.

Indonesia dengan populasi yang merupakan urutan keempat terbanyak di dunia, memiliki potensi besar untuk kemajuan negara jika penduduknya memiliki kualitas hidup yang baik. Menurut perspektif UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia berarti memberikan pilihan yang lebih luas bagi penduduk, sambil menjadi ukuran untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai alat untuk mengukur kemajuan suatu negara dalam pengembangan ekonomi jangka panjang. IPM didasarkan pada tiga dimensi utama: harapan hidup yang panjang dan kesehatan yang baik, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. IPM merupakan indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan upaya pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, meliputi akses terhadap pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan aspek pembangunan lainnya.

Pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi saling terkait secara timbal balik. Pertumbuhan ekonomi menjadi prasyarat bagi peningkatan pembangunan manusia karena dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, pembangunan manusia juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi memungkinkan penduduk untuk lebih efektif dalam mengelola sumber daya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Namun, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak selalu otomatis. Beberapa daerah dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa diimbangi oleh pembangunan manusia yang seimbang.

Grafik 2. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara

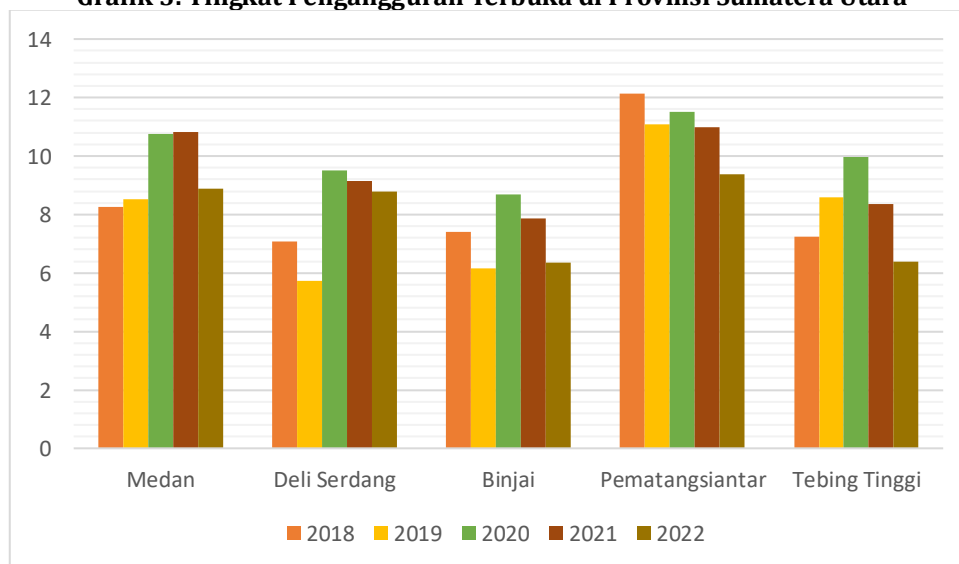


Berdasarkan grafik 2 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara dalam persen, pada kota Medan indeks pembangunan manusia tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 81,76% sedangkan indeks pembangunan manusia terendah pada tahun 2018 sebesar 80,65%. Pada kota Deli Serdang indeks pembangunan manusia tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 76,19% sedangkan indeks pembangunan manusia terendah pada tahun 2018 sebesar

74,92%. Pada kota Binjai indeks pembangunan manusia tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 76,95% sedangkan indeks pembangunan manusia terendah pada tahun 2018 sebesar 75,21%. Pada kota Pematangsiantar indeks pembangunan manusia tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 79,70% sedangkan indeks pembangunan manusia terendah pada tahun 2018 sebesar 77,88%. Pada kota Tebing Tinggi indeks pembangunan manusia tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 76,17% sedangkan indeks pembangunan manusia terendah pada tahun 2018 sebesar 74,5%. Dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia bisa di ukur dengan beberapa indikator, yaitu yang pertama kesehatan bisa diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH), yang kedua pengetahuan atau pendidikan diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLM) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan yang ketiga standar layak hidup diukur melalui pengeluaran perkapita yang di sesuaikan.

Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan peningkatan kesempatan kerja. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap sebagai indikator positif, namun jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan tersebut hanya akan menjadi beban bagi pembangunan. Masalah pengangguran menjadi salah satu tantangan yang sulit dihindari oleh suatu negara, di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja menginginkan pekerjaan namun belum mampu mendapatkannya. Pengangguran berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti peningkatan tindak kriminalitas dan kekerasan. Selain itu, ketidakadanya pendapatan juga dapat mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi. Pengangguran yang berkepanjangan juga berdampak pada kesejahteraan psikologis individu pengangguran dan keluarganya, serta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Grafik 3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara



Berdasarkan grafik 3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara dalam persen, pada kota Medan tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 10,81% sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah pada tahun 2018 sebesar 8,25%. Pada kota Deli Serdang tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 9,5% sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah pada tahun 2019 sebesar 5,74%. Pada kota Binjai tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 8,67% sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah pada tahun 2019 sebesar 6,14%. Pada kota Pematangsiantar tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 12,14% sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah pada tahun 2022 sebesar 9,36%. Pada kota Tebing Tinggi tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu pada tahun 2020

sebesar 9,98% sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah pada tahun 2022 sebesar 6,39%. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh upah minimum kota (UMK) dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara”.

Kajian Teoritis

Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup manusia. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar hidup. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pengangguran menjadi topik yang sering diperdebatkan dalam perdebatan politik. Para politisi sering mempertimbangkan bagaimana kebijakan mereka akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan (Mankiw, 2003). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), pengangguran mencakup mereka yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pengangguran juga mencakup mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Menurut Sukirno (2008), pengangguran adalah ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja berusaha untuk mendapatkan pekerjaan tetapi tidak berhasil.

Upah Minimum

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum “upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap”. UMK ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan harus lebih tinggi daripada UMP. Hal tersebut dapat menjadi langkah yang efektif dalam menjaga daya beli pekerja dan mencegah upah yang terus merosot di bawah standar kebutuhan dasar. Menurut Todaro dan Stephen C (2014) minimum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan demikian dapat mengurangi kemiskinan, Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan bakat menunjukkan standar hidup masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

UNDP (United Nations Development Programme) Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Menurut Mitha (2021), salah satu alat yang digunakan oleh suatu negara untuk mengukur tingkat pembangunan yang dicapai adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya, tiga indikator kualitas pembangunan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengembangan suatu wilayah: harapan hidup, standar hidup, dan pengetahuan. Menurut perspektif Adam Smith, manusia adalah komponen produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa, dan alokasi sumber daya manusia yang efektif menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar (Marwan, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk meneliti hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis penelitian asosiatif ini bertujuan untuk

mengetahui hubungan kausal atau sebab-akibat antara variabel bebas seperti Upah Minimum Kota(X1) dan Indeks Pembangunan Manusia (X2) terhadap variabel terikat yaitu Tingkat Pengangguran (Y). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang merupakan metode penelitian yang mengandalkan pengumpulan dan analisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Pendekatan analisis kuantitatif melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan masalah, merancang model, mengumpulkan data, mencari solusi, menguji solusi, menganalisis hasil, dan menginterpretasikan temuan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara tingkat upah minimum kota dan indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran di Sumatera Utara selama periode 2018-2022. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh tidak langsung melalui media perantara, yang telah dicatat atau dipublikasikan oleh pihak lain. Data sekunder dapat berupa catatan historis, laporan, atau bukti yang tersusun dalam arsip. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu melalui pengumpulan data sekunder dengan kepustakaan dan manual (Nur Asnawi Dan Masyhuri, 2011). Untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka teknik analisis data dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan program eviews 12. Adapun uji yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah Uji Data Panel yang meliputi Uji Chow, Uji Hausman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Chow

| Redundant Fixed Effects Tests | | | |
|----------------------------------|-----------|--------|--------|
| Equation: Untitled | | | |
| Test cross-section fixed effects | | | |
| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
| Cross-section F | 12.326734 | (4,23) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 34.362775 | 4 | 0.0000 |

Nilai prob 0.00 < 0,05, maka yang terpilih adalah model FEM.

Tabel 2. Hasil Uji Hausmann

| Correlated Random Effects - Hausman Test | | | |
|--|-------------------|--------------|--------|
| Equation: Untitled | | | |
| Test cross-section random effects | | | |
| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
| Cross-section random | 22.730360 | 2 | 0.0000 |

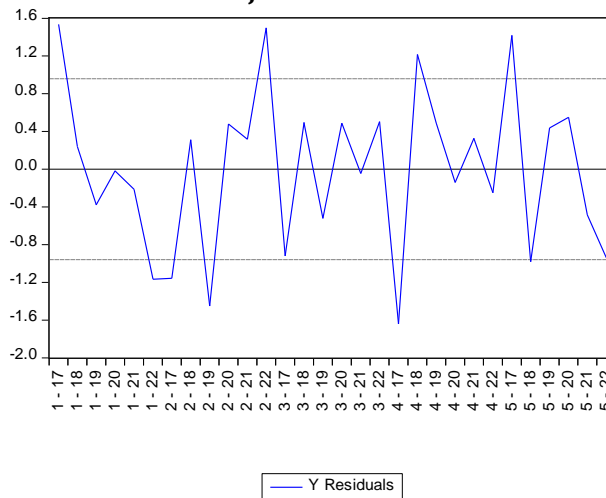
Nilai prob 0,00 , 0,05, maka yang terpilih adalah model FEM.

Berdasarkan hasil Uji Chow, Uji Hausman maka model yang terbaik dipilih dalam penelitian ini adalah model FEM

Tabel 3. Uji Mutikolinieritas

| | X1 | X2 |
|----|----------|----------|
| X1 | 1.000000 | 0.432218 |
| X2 | 0.432218 | 1.000000 |

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas



Dari grafik residual dapat dilihat bahwa angka tidak ada yang melewati batas (500 dan -500), artinya varian residual sama. Oleh sebab itu, tidak terjadi adanya heterokedastisitas atau loos uji.

Persamaan Regresi Data Panel

Persamaan:

$$Y = 167.146408567 + 7.41098995691e-06 \cdot X2 - 2.30675320388 \cdot X1 + [CX=F]$$

1. Nilai konstanta sebesar 167.1464 artinya tanpa adanya variabel IPM dan UMK, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 167,1464.
2. Nilai koefisien beta variabel IPM sebesar - 2.30675, jika nilai variable lain konstan dan variabel x1 mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 2.30675. Begitu juga sebaliknya, jika variabel x1 mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel y akan mengalami peningkatan sebesar 2.30675.
3. Nilai koefisien beta variabel UMK sebesar 7.410989, jika nilai variable lain konstan dan variabel x1 mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 7.410989. Begitu juga sebaliknya, jika variabel x1 mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel y akan mengalami penurunan sebesar 7.410989.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji T

| | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|--------|
| Dependent Variable: Y | | | | |
| Method: Panel Least Squares | | | | |
| Date: 04/01/24 Time: 15:19 | | | | |
| Sample: 2017 2022 | | | | |
| Periods included: 6 | | | | |
| Cross-sections included: 5 | | | | |
| Total panel (balanced) observations: 30 | | | | |
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
| C | 167.1464 | 39.23414 | 4.260229 | 0.0003 |
| X2 | 7.41E-06 | 1.52E-06 | 4.886512 | 0.0001 |
| X1 | -2.306753 | 0.553784 | -4.165440 | 0.0004 |

Pengaruh variable independent terhadap variable dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Hasil uji t pada variable Indeks Pembangunan Manusia (x1) diperoleh nilai t hitung sebesar 4.165440 lebih besar dari nilai t table yaitu 2,048407142 dan nilai sig. 0,0004 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia (x1) berpengaruh terhadap variabel Pengangguran (y).
2. Hasil uji t pada variabel Upah Minimum (x2) terhadap variabel pengangguran (y) diperoleh nilai t hitung sebesar 4.886512 lebih besar dari nilai t table ,048407142. Nilai signifikansi menunjukkan nilai sebesar 0,0001 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Maka dapat ditarik H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variable Upah Minimum (x2) berpengaruh terhadap variabel pengangguran (y).

t table = 2,048407142

Tabel 6. Hasil Uji F

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.769210 | Mean dependent var | 8.654333 |
| Adjusted R-squared | 0.709004 | S.D. dependent var | 1.776831 |
| S.E. of regression | 0.958495 | Akaike info criterion | 2.954058 |
| Sum squared resid | 21.13038 | Schwarz criterion | 3.281004 |
| Log likelihood | -37.31087 | Hannan-Quinn criter. | 3.058651 |
| F-statistic | 12.77629 | Durbin-Watson stat | 2.015822 |
| Prob(F-statistic) | 0.000002 | | |

Nilai F hitung sebesar 12.77629 lebih besar dari nilai F table yaitu 3,354130829, dan nilai signifikansi yaitu 0.000002 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Maka dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Kab/Kota berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara.

F table = 3,354130829

Tabel 7. Uji Koefisein Determinasi (R²)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.769210 | Mean dependent var | 8.654333 |
| Adjusted R-squared | 0.709004 | S.D. dependent var | 1.776831 |
| S.E. of regression | 0.958495 | Akaike info criterion | 2.954058 |
| Sum squared resid | 21.13038 | Schwarz criterion | 3.281004 |
| Log likelihood | -37.31087 | Hannan-Quinn criter. | 3.058651 |
| F-statistic | 12.77629 | Durbin-Watson stat | 2.015822 |
| Prob (F-statistic) | 0.000002 | | |

Nilai adjusted Rsquare sebesar 0,70900 atau 70,900%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Kab/Kota mampu menjelaskan variabel Tingkat pengangguran di Sumatera Utara sebesar 70,900%. Sedangkan sisanya yaitu 29,80% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan tentang pengaruh upah minimum kota (UMK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara dapat disusun sebagai berikut:

1. Upah Minimum Kota (UMK):
 - a. Kebijakan UMK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara. Kenaikan UMK dapat berdampak pada penurunan tingkat pengangguran, terutama dalam jangka pendek.
 - b. Namun, peningkatan UMK juga dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, seperti penurunan jumlah peluang kerja karena biaya produksi yang meningkat bagi pengusaha.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM):
 - a. IPM memiliki hubungan yang kompleks dengan tingkat pengangguran. Di satu sisi, peningkatan IPM dapat berdampak positif terhadap kesempatan kerja melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat.
 - b. Namun, di sisi lain, peningkatan IPM juga dapat memicu tingkat ekspektasi gaji yang lebih tinggi, yang mungkin tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai.
3. Interaksi Antara UMK dan IPM:
 - a. Hubungan antara UMK dan IPM juga perlu diperhatikan. Peningkatan UMK yang tidak sejalan dengan peningkatan IPM mungkin tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan pengangguran secara berkelanjutan.
 - b. Sebaliknya, koordinasi kebijakan antara kenaikan UMK dan peningkatan IPM dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif di Sumatera Utara.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk mengembangkan kebijakan yang seimbang antara kenaikan UMK dan peningkatan IPM, serta untuk memperhatikan aspek-aspek seperti pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan sumber daya manusia di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghinastri, S., & syafitri, W. (2024). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Tingkat Peangguran Terbuka (TPT) Dan Kemiskinan. *Journal Of Development Economic And Social Studies* , 3, 72–83.
- Mahihody, A. Y., Engka, D. S. M., Luntungan, A. Y., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2018). Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) TERHADAP Pengangguran Di Kota Manado. In *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol. 18, Issue 03).
- Mahroji, D., Ekonomi, J., Stie, P., & Madania, P. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. 9(1). <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/>
- Muhammad Baihawafi, & Asnita Frida Sebayang. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terbuka. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 39–44. <https://doi.org/10.29313/jriev.v3i1.1911>
- Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. S. (2019). The Analysis Of The Effects Of Human Development Index And Opened Unemployment Levels To The Poverty In Indonesia. In *Jurnal Ecoplan* (Vol. 2, Issue 2).
- Priseptian, L., Priana Primandhana, W., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, F. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>
- Qamariyah, L., Mardianita, O., & Rusgianto, S. (2022). Pengaruh IPM, Investasi, Dan Ump Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur Tahun 2013-2020. *OECOMICUS Journal of Economics*, 7, 1–15.